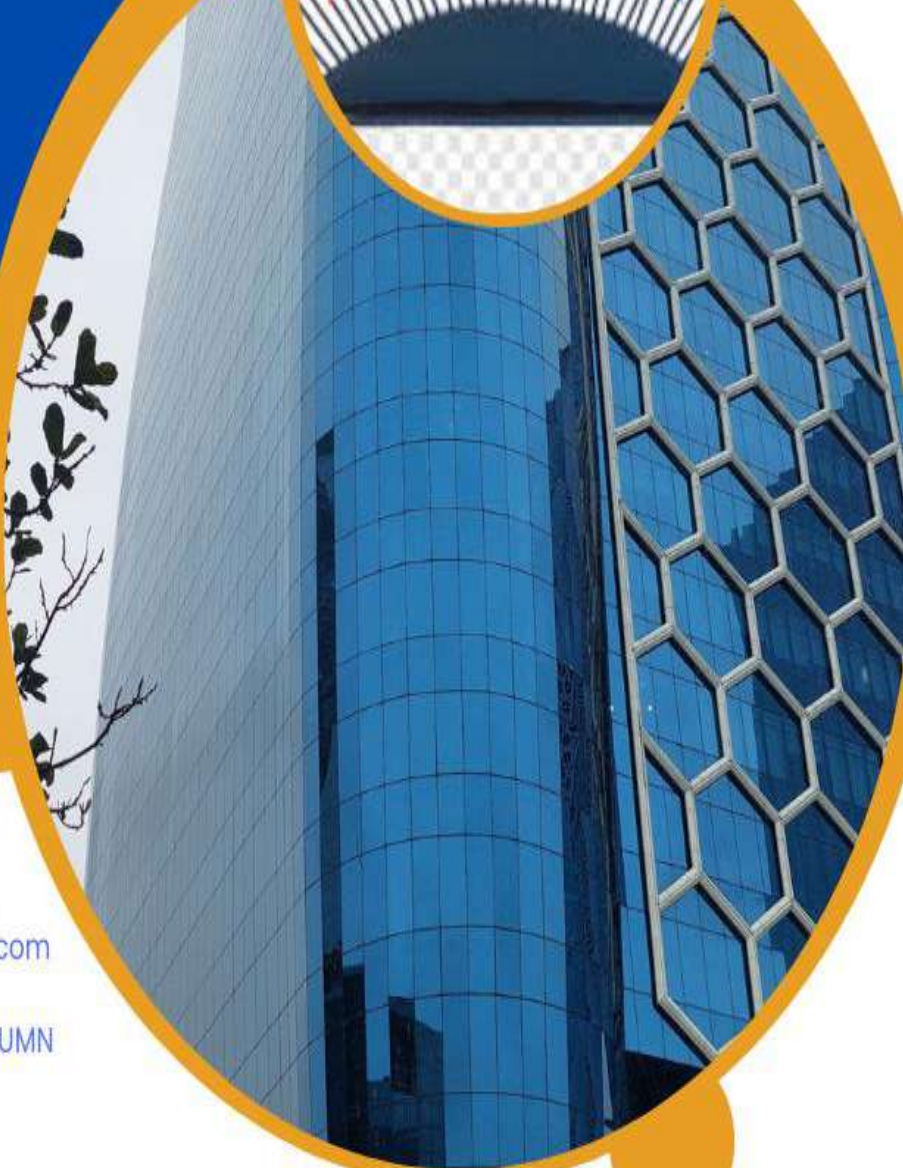


LAPORAN KINERJA

DEPUTI BIDANG KERJA SAMA INTERNASIONAL

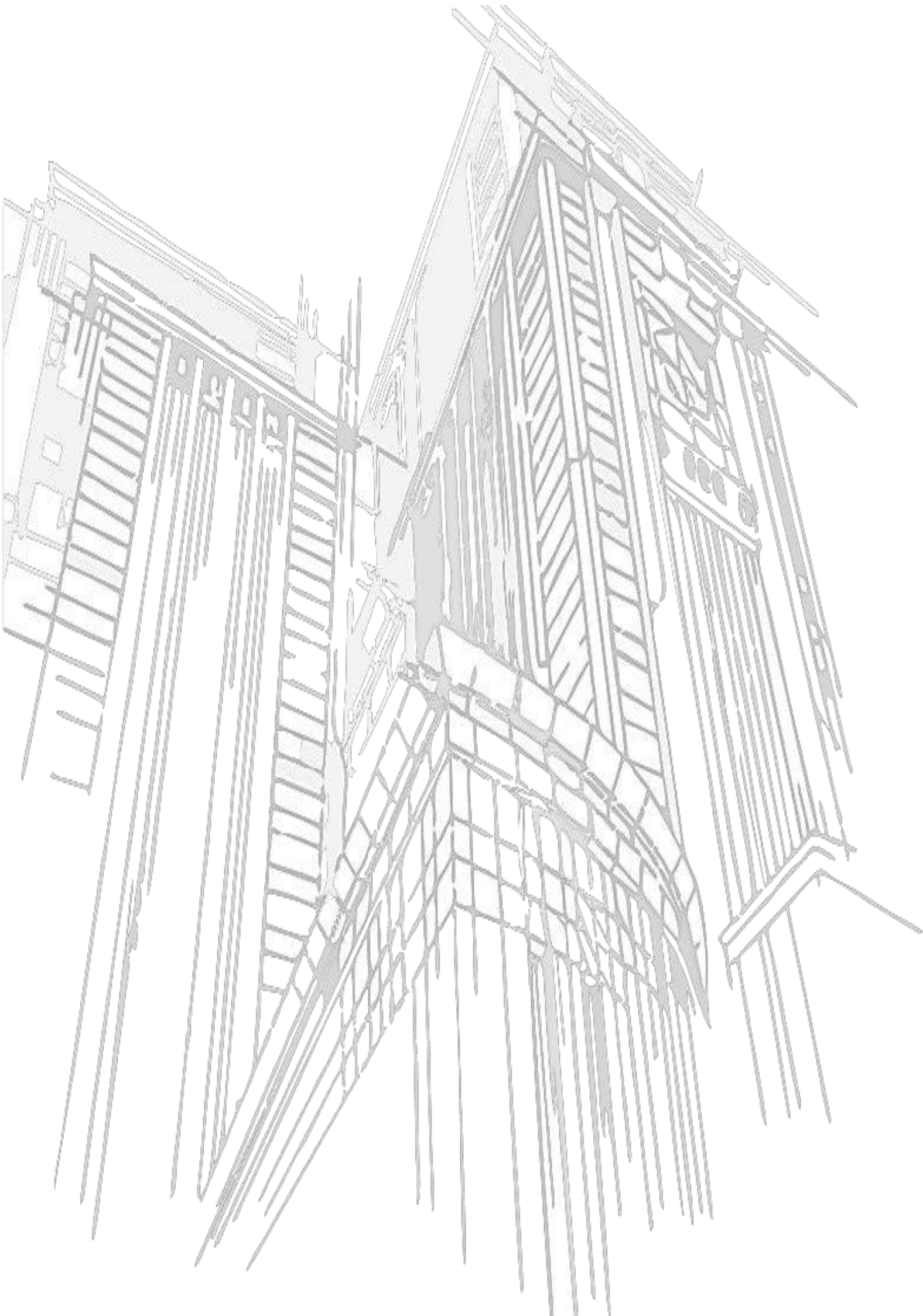
TA. 2023



tu.deputikersin@gmail.com



Gedung Kementerian BUMN
lantai 14, Jakarta





ANDHIKA CHRISNAYUDHANTO

DEPUTI BIDANG KERJA SAMA
INTERNASIONAL

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji kehadiran Allah Subhanallahu Wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Esa, yang telah menganugerahkan tenaga dan kesehatan, sehingga setahun penuh kita seluruh keluarga besar Deputy Bidang Kerja Sama Internasional dapat memberikan karya terbaik dan mampu menghadapi tantangan dan meraih kepercayaan di forum internasional sepanjang tahun 2023.

Deputy Bidang Kerja Sama Internasional BNPT yang didukung oleh Unit Eselon II sebanyak 3 (tiga) Direktorat menjalankan tugas yang strategis yakni partisipasi aktif dalam forum internasional, penguatan kerja sama, penyusunan rekomendasi kebijakan dan koordinasi pada level Kementerian/Lembaga, stakeholder dan negara mitra.

Kami merasa sangat bangga karena tugas 1 tahun telah terlampaui dengan luar biasa dalam hal capaian kinerja dan partisipasi aktif BNPT di forum internasional.

Hal ini menunjukkan bahwa Deputy Bidang Kerja Sama Internasional terus berupaya menjaga komitmen dalam mendukung tercapainya visi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yakni "Negara dan Masyarakat Aman Dari Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme Dalam rangka Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong"

Kami tidak cepat berpuas diri dengan berbagai capaian dan kepercayaan yang diperoleh; hal ini tercermin dari upaya peningkatan berkelanjutan yang terus diupayakan dalam mendorong Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang lebih baik, melalui diantaranya membuat program-program inisiatif strategis, serta mendorong dan mendukung transformasi digital.

Keseluruhan pencapaian yang tergambar dalam laporan kinerja Deputy Bidang Kerja Sama Internasional ini tentu saja tidak lepas dari peran seluruh pegawai, mulai dari jajaran Pejabat/Pimpinan Unit Eselon II hingga pegawai pelaksana dan pemangku kepentingan, dimana kata syukur dan terimakasih tidak dapat mewakili dalamnya pengabdian tersebut, semoga Allah Subhanallahu Wa Ta'ala dapat memberikan pengganti yang baik dan keberkahan atas segala jerih payah yang telah tercurah selama ini.

Akhir kata, kami susun laporan ini sebagai salah satu wujud akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Kerja Sama Internasional ini sesuai dengan amanat Perundangan dan besar harapan kami dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Januari 2024

Deputy Bidang Kerja Sama Internasional

Andhika Chrisnayudhanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	3
C. Tugas dan Fungsi.....	3
D. Sumber Daya Manusia.....	11
E. Sistematika Laporan.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	17
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	18
C. Sasaran Strategis BNPT.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	24
B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama.....	27
C. Kinerja Anggaran.....	58
BAB IV PENUTUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Formasi Jabatan Struktur Organisasi.....	4
Tabel 2 Perjanjian Kinerja	22



EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Deputy Bidang Kerja Sama Internasional adalah bentuk akuntabilitas dari realisasi capaian kinerja dan anggaran pada tahun 2023. Laporan ini menggambarkan dan memuat analisis capaian kinerja Deputy Bidang Kerja Sama Internasional membandingkannya dengan target pada Perjanjian Kinerja yang ditetapkan di awal tahun 2023.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Kerja Sama Internasional Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Kinerja Deputy Bidang Kerja Sama Internasional diukur dengan menggunakan metode Balance Scorecard (BSC) yang dibagi menjadi 3 (tiga) perspektif, yaitu: Stakeholder yang mengukur tingkat Satuan kerja, Internal Business Process yang mengukur tingkatan operasional Satuan Kerja, dan Learning and Growth yang mengukur tingkatan dukungan operasional Satuan Kerja.



EXECUTIVE SUMMARY

Penetapan Kinerja Deputy Bidang Kerja Sama Internasional tahun 2023 yang ditetapkan di awal tahun 2023 terdiri dari 1 (satu) Sasaran Strategis yang tersebar ke masing-masing perspektif. Sasaran Strategis Deputy Bidang Kerja Sama Internasional adalah SS6 yakni Terselenggaranya sama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional, dan multilateral, serta penguatan perangkat hukum internasional dan perlindungan WNI dari ancaman tindak pidana terorisme di luar negeri, yang terperinci dinarasikan pada Bab III yang juga menampilkan seluruh pencapaian IKU Deputy Bidang Kerja Sama Internasional tahun 2023.

Pencapaian target kinerja Deputy Bidang Kerja Sama Internasional pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar 100%, yakni sebanyak 14 Kesepakatan dan 8 Rekomendasi Kebijakan, dengan penyerapan anggaran 99.91%, yakni sebesar Rp 19.885.594.460,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 19.903.213.000,00.



Penjelasan Umum Organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta isu /kegiatan utama (strategic issues) yang dihadapi organisasi sepanjang tahun 2023

- A. Latar Belakang
- B. Maksud Tujuan
- C. Tugas dan Fungsi
- D. Sumber Daya Manusia
- E. Sistematika Laporan Kinerja



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sesuai mandat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas untuk menyusun kebijakan, strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme serta mengoordinasikan instansi pemerintah terkait pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme. Pada pasal 43G huruf d disebutkan bahwa salah satu pelaksanaan mandat tersebut meliputi bidang kerjasama internasional. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

melalui Deputi Bidang Kerjasama Internasional terus mengembangkan kerja sama pada tingkat regional dan multilateral, kerjasama bilateral dan perangkat hukum internasional dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia dalam upaya bersama sinkronisasi kerjasama internasional dalam penanggulangan terorisme.

Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Deputi Bidang Kerja sama Internasional mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan

dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang kerja sama internasional dalam rangka penanggulangan terorisme. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Kerja Sama Internasional dituntut untuk melaksanakannya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah

satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja (LAKIN) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Deputi Bidang Kersin dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi.

LAKIN Deputi Bidang Kerja Sama Internasional sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Kerja Sama Internasional, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Deputy Bidang Kerja Sama Internasional Tahun 2023 juga sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja.

Tujuan

Tujuan dari pelaporan kinerja untuk memberikan informasi kinerja Deputy Bidang Kerja Sama Internasional Tahun 2023 yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai

upaya perbaikan berkesinambungan bagi Deputy Bidang Kerja Sama Internasional untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Deputy Bidang Kerja Sama Internasional adalah unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Deputy Bidang Kerja Sama Internasional mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional di

bidang kerja sama internasional dalam rangka penanggulangan terorisme.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputy Bidang Kerja Sama Internasional menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan monitoring, analisis, dan evaluasi mengenai ancaman terorisme internasional dan kerjasama internasional dalam menanggulangi terorisme;
2. Penyusunan kebijakan, strategi, dan program kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme;
3. Pelaksanaan dan pengembangan kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme, dan;

4. Koordinasi pelaksanaan perlindungan warga negara Indonesia dan kepentingan nasional di luar negeri dari ancaman terorisme.

Struktur dan susunan organisasi Deputy Bidang Kerja Sama Internasional Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terdiri atas:



Gambar 1 Struktur Organisasi Deputy Bidang Kerja Sama Internasional

Berdasarkan Gambar 1 di atas, Deputi Bidang Kerja Sama Internasional dibantu oleh 3 (tiga) direktorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu:

- 1) Direktorat Kerja Sama Bilateral;
- 2) Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral; serta
- 3) Direktorat Perangkat Hukum Internasional.

D. Sumber Daya Manusia

Aspek sumber daya manusia menjadi salah satu bagian penting dalam rangka menghadirkan proses perencanaan ketersediaan sumber daya manusia sampai dengan pengembangan dan terminasinya. Pentingnya peran sumber daya manusia bagi keberhasilan suatu organisasi sehingga dewasa ini setiap organisasi berlomba untuk mengelola dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya.

Tidak ketinggalan pula organisasi pemerintahan di Indonesia. Apalagi selama ini sumber daya manusia organisasi pemerintahan di Indonesia dinilai belum banyak yang menggunakan konsep manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi sehingga berujung pada kurang tersedianya sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas serta mampu melaksanakan perannya melayani masyarakat. Padahal, untuk mewujudkan keberhasilan dalam melaksanakan peran dan fungsinya, organisasi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah mutlak harus digerakkan oleh sumber daya manusia yang kompeten, tangguh, profesional, dan adaptif terhadap perubahan.

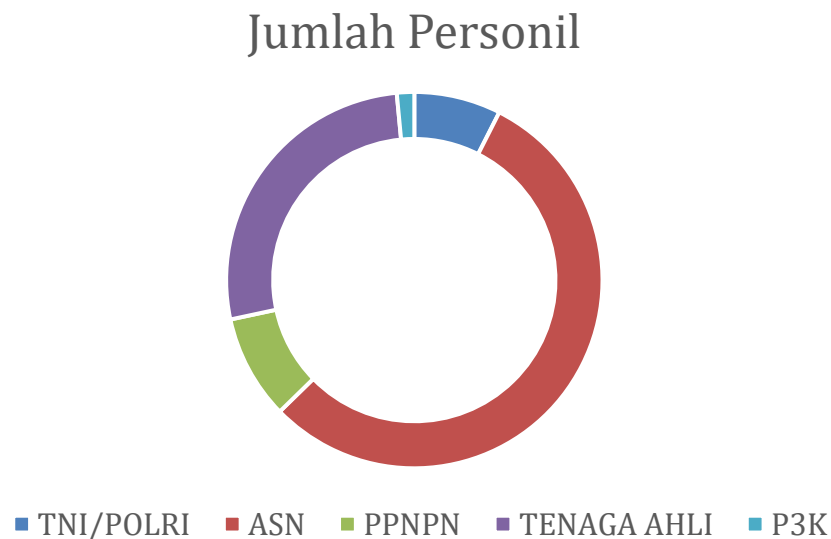
Sumber daya manusia memainkan peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan organisasi dan secara bersama mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara. Sumber daya manusia merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) di dalam organisasi yang diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Untuk menjalankan program-programnya, Deputi Bidang Kerja Sama Internasional memberikan pelayanan secara terintegrasi, sinergis, dan terkendali, serta didukung oleh manajemen kepemimpinan yang sangat kuat

dalam membangun hubungan kerja yang baik antar staf, hubungan atasan-bawahan serta hubungan eksternal seperti persaingan baik antar maupun inter organisasi, keadaan stabilitas politik, sosial serta politik. Hal tersebut tidak luput dari kinerja pimpinan birokrasi sehingga terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan baik.

Secara kuantitas, jumlah pegawai di Deputy Bidang Kerja Sama Internasional berjumlah pegawai dengan komposisi yang dibagi berdasarkan status pegawai, jenis kelamin, dan pangkat sebagai berikut:

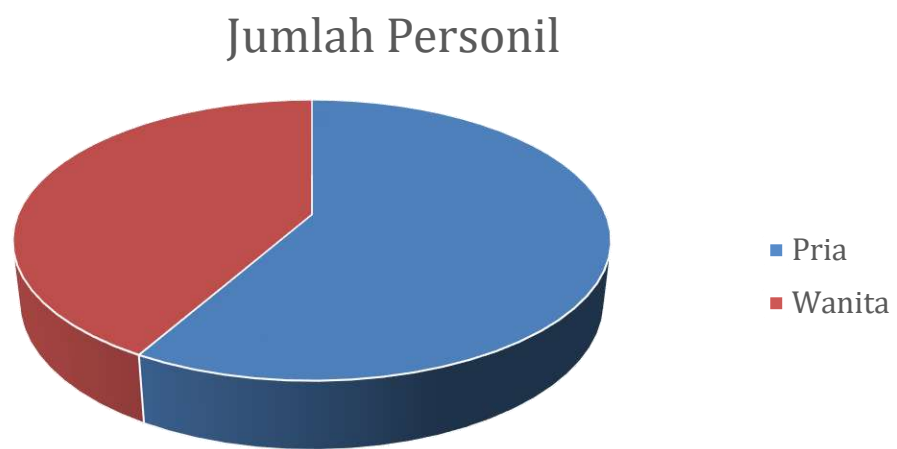
1. Status Pegawai



Pegawai di Deputy Bidang Kerja Sama Internasional terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/Polri, PPNPN dan Tenaga Pendukung Individual. Pada tahun 2023, pegawai di Deputy Bidang Kerja Sama Internasional didominasi oleh PNS dengan jumlah 37 orang atau setara 55,22%. Setelah itu diikuti oleh TNI/Polri dengan jumlah 5 orang atau setara 7,46% dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebanyak 6 orang atau setara 8,96% kemudian pegawai dengan status Tenaga Pendukung Individual dengan jumlah 18 orang atau setara 26,87% dan pegawai PPPK sebanyak 1 orang atau setara 1,49%.

2. Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai Deputy Bidang Kerja Sama Internasional didominasi oleh pegawai laki-laki. Jumlah pegawai laki-laki sebanyak 39 orang atau sekitar 58,20% dan jumlah pegawai perempuan sebanyak 28 orang atau sekitar 41,80%.



3. Jabatan

Sesuai susunan organisasi di atas, Deputy Bidang Kerja Sama Internasional terdiri dari 20 (dua puluh) pejabat struktural dimana jabatan tertinggi dipimpin oleh 1 orang yang dibantu oleh 3 (tiga) eselon II, 5 (lima) eselon III, 1 (satu) pejabat fungsional Ahli Madya dan 12 (dua belas) pejabat fungsional Ahli Muda.

Jumlah jabatan struktural pada Deputy Bidang Kerja Sama Internasional dari 9 jabatan. Posisi formasi tersebut telah terisi sebanyak 9 jabatan, sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah		
		Formasi	Terisi	Belum Terisi
1.	Eselon I	1	1	-
2.	Eselon II	3	3	-
3.	Eselon III	5	5	-
4.	Jabatan Fungsional (koordinator)	1	0	1
5.	Jabatan Fungsional (sub koordinator)	13	12	1
6.	Staf	47	47	-
Jumlah		70	68	2

E. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Deputi Bidang Kerja Sama Internasional adalah sebagai berikut:

1) Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

2) Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

3) Bab III Akuntabilitas Kinerja

a) Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

b) Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

c) Kinerja Lain-Lain

Pada sub bab ini dijelaskan terobosan-terobosan yang diinisiasi Deputi Bidang Kerja Sama Internasional dan berdampak secara nasional (tidak masuk dalam output yang diukur pada IKU)

4) Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian/keberhasilan.



2

Perencanaan Kinerja

Ringkasan /Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Tahun 2023

- A. Rencana Strategis Deputy Bidang
Kerja Sama Internasional
- B. Rencana Kerja 2023
- C. Pengukuran Kinerja
- D. Monitoring dan Evaluasi



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi BNPT

Visi BNPT 2020-2024:

“Negara dan Masyarakat Aman Dari Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme Dalam rangka Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”

Berdasarkan pernyataan di atas, Visi BNPT 2020-2024 memiliki 3 (tiga) kata kunci, yaitu :

- (1) negara aman dan masyarakat aman,
- (2) dari ancaman terorisme; dan
- (3) dari tindak pidana terorisme

Berdasarkan Visi tersebut, dirumuskan Visi Deputy Bidang Kerja Sama Internasional sebagai berikut:

“Kerja Sama Internasional Yang Efektif dan Efisien Dalam Rangka Mewujudkan Negara dan Masyarakat Aman Dari Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme”

2. Misi BNPT

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 899 Tahun 2019 tentang Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan wakil Presiden, BNPT telah menyelaraskan misinya, yaitu:

“Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dari ancaman maupun tindak pidana terorisme”.

Untuk mendukung misi tersebut Deputy Bidang Kerja Sama Internasional mengusung misi sebagai berikut:

“Melaksanakan kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional, dan multilateral, serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri”

Misi tersebut berarti Deputy Bidang Kerja Sama Internasional sebagai salah satu unit kerja BNPT berfokus pada inisiasi dan pelaksanaan kerja sama internasional dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di dunia. Misi ini sekaligus mempresentasikan bahwa Indonesia menjadi bagian dalam pelaksanaan kerja sama, baik bilateral, regional dan multilateral untuk bersama-sama negara lain memerangi terorisme di dunia. Kerja sama yang dibangun meliputi berbagai hal, mulai dari upaya pencegahan tindak pidana terorisme hingga penguatan penegakan hukum internasional terkait tindak pidana terorisme.

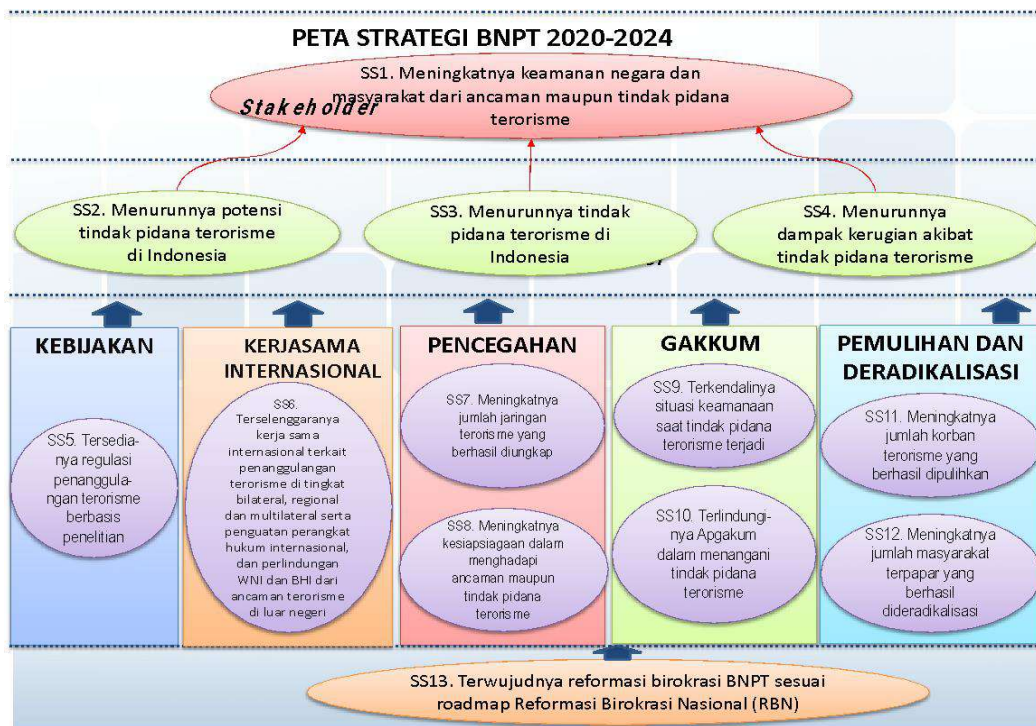
3. Tujuan Strategis

Indikator Tujuan diukur sebagai ukuran dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Indikator Tujuan diukur di akhir periode perencanaan (tahun 2024). Berikut merupakan Tujuan dan Indikator Tujuan Deputy Bidang Kerja Sama Internasional.

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
Melaksanakan kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional, dan multilateral, serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri	Meningkatkan pelaksanaan kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional, dan multilateral, serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri	Jumlah kerja sama BNPT dalam penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional, dan multilateral (MoU)

4. Sasaran Program

Sasaran Program merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Deputy Bidang Kerja Sama Internasional dalam bentuk capaian secara nyata dan mencerminkan outcome yang dihasilkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun sasaran Strategis BNPT telah ditetapkan menggunakan kerangka kerja *balanced scorecard*. Sasaran Strategis ini ditetapkan dalam peta strategi BNPT 2020-2024 sebagai berikut:



Gambar Peta Strategi BNPT 2020-2024

Gambar di atas menjelaskan strategi BNPT Tahun 2020-2024 melalui 4 (empat) perspektif yaitu *learn and growth*, *internal business process*, *customer*, dan *stakeholder*. Masing-masing perspektif mewakili tinggi atau rendahnya level sasaran strategis yang akan dicapai. Dengan tercapainya semua sasaran strategis tersebut maka Visi BNPT 2020-2024 diharapkan akan tercapai.

Sasaran Program Deputi Bidang Kerja Sama Internasional merupakan penjabaran dari Sasaran Strategis BNPT sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan demikian, Deputi Bidang Kerja Sama Internasional memiliki 1 (satu) sasaran program yaitu "Terselenggaranya kerja sama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri".

Sasaran program tersebut berarti seluruh kegiatan dan program Deputi Bidang Kerja Sama Internasional akan diarahkan untuk mewujudkan kerja sama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral. Selain itu, penguatan perangkat hukum

internasional serta perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri juga menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan kegiatan dan program Deputi Bidang Kerja Sama Internasional.

5. Program dan Kegiatan

No.	Output	Penetapan Kinerja
1.	Menyepakati Kerja Sama Regional	1 Kesepakatan
2.	Pelaksanaan Kerja Sama Regional	2 Kesepakatan
3.	Menyepakati Kerja Sama Multilateral	1 Kesepakatan
4.	Pelaksanaan Kerja Sama Multilateral	2 Kesepakatan
5.	Menyepakati perjanjian kerja sama bilateral dengan negara-negara di Asia Pasifik dan Afrika	1 Kesepakatan
6.	Pelaksanaan kerja sama bilateral dengan negara-negara di Asia Pasifik dan Afrika	3 Kesepakatan
7.	Menyepakati perjanjian kerja sama bilateral dengan negara-negara di Amerika dan Eropa	1 Kesepakatan
8.	Pelaksanaan kerja sama bilateral dengan negara-negara di Amerika dan Eropa	3 Kesepakatan
9.	Partisipasi aktif BNPT pada pelaksanaan konvensi dan resolusi penanggulangan terorisme internasional	4 Rekomendasi Kebijakan
10.	Partisipasi aktif BNPT dalam upaya perlindungan WNI dan kepentingan nasional di luar negeri dari tindak pidana terorisme	4 Rekomendasi Kebijakan

B. Perjanjian Kinerja tahun 2023

Terkait dengan perjanjian kinerja. sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, diwajibkan kepada seluruh entitas

Tabel 1 Perjanjian Kinerja

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
Terselenggaranya kerja sama Internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri	1. Persentase kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti	100%
	2. Persentase kerja sama regional dan multilateral yang ditindaklanjuti	100%
	3. Persentase rekomendasi kebijakan forum internasional yang ditindaklanjuti	100%

Kegiatan	Anggaran
Penanggulangan Terorisme Bidang Kerja Sama Internasional	Rp. 16.860.719.000,00

C. Sasaran Strategis

Sesuai dengan Rencana Strategis BNPT Tahun 2020-2024 halaman 88, salah satu arah kebijakan dan strategi BNPT yaitu optimasi kerja sama Internasional di tingkat bilateral, regional, dan multilateral dalam penanggulangan terorisme, serta melaksanakan kerjasama penguatan perangkat hukum Internasional dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri dari ancaman terorisme.



ACCOUNTABILITY

3

Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Analisis Capaian Kinerja Indikator Utama
- C. Kinerja Anggaran



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Sepanjang tahun 2023, Kedeputan Bidang Kerja Sama Internasional telah berhasil memenuhi target penetapan kinerja dengan realisasi sebesar 100%. Adapun capaian masing-masing komponen program kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel Capaian Kinerja Organisasi

No	Output	Penetapan Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Menyepakati Kerja Sama Regional	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan
2.	Pelaksanaan Kerja Sama Regional	2 Kesepakatan	2 Kesepakatan
3.	Menyepakati Kerja Sama Multilateral	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan
4.	Pelaksanaan Kerja Sama Multilateral	2 Kesepakatan	2 Kesepakatan
5.	Menyepakati perjanjian kerja sama bilateral	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan

	dengan negara-negara di Asia Pasifik dan Afrika		
6.	Pelaksanaan kerja sama bilateral dengan negara-negara di Asia Pasifik dan Afrika	3 Kesepakatan	3 Kesepakatan
7.	Menyepakati perjanjian kerja sama bilateral dengan negara-negara di Amerika dan Eropa	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan
8.	Pelaksanaan kerja sama bilateral dengan negara-negara di Amerika dan Eropa	3 Kesepakatan	3 Kesepakatan
9.	Partisipasi aktif BNPT pada pelaksanaan konvensi dan resolusi penanggulangan terorisme internasional	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan
10.	Partisipasi aktif BNPT dalam upaya perlindungan WNI dan kepentingan nasional di luar negeri dari tindak pidana terorisme	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan

2. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target 2023	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terselenggaranya kerja sama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri	1. Persentase kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti	8 (delapan) kesepakatan	8 (delapan) kesepakatan	100
		2. Persentase kerja sama regional dan multilateral yang ditindaklanjuti	6 (enam) kesepakatan	6 (enam) kesepakatan	100
		3. Persentase rekomendasi kebijakan forum internasional yang ditindaklanjuti	8 (delapan) rekomendasi kebijakan	8 (delapan) rekomendasi kebijakan	100

i. Perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja pada Renstra

Sasaran Strategis “Terselenggaranya kerja sama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri”			
Tahun 2023		Renstra 2020 – 2024	
Target	Realisasi	Target	% terhadap target Renstra
100%	100%	100%	100%

ii. Perbandingan realisasi kinerja 2021, 2022 dan 2023

Tujuan/ Sasaran	Indikator	2021 & 2022			Indikator	2023		
		Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian
Terselenggaranya kerja sama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri	Indeks pelaksanaan kerja sama internasional di tingkat bilateral, regional dan multilateral	0.9	0,9	100%	1. Persentase kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
					2. Persentase kerja sama regional dan multilateral yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
					3. Persentase rekomendasi kebijakan forum internasional yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Direktorat Kerja Sama Bilateral

Direktorat Kerjasama Bilateral telah melaksanakan sejumlah kegiatan yang terukur sebagai pencapaian kinerja tahun 2023 sebagai berikut:

a. Menyepakati Perjanjian Kerjasama Bilateral dengan Negara-negara di Asia Pasifik dan Afrika

- 1) Kerja sama bilateral antara Indonesia dengan negara mitra dalam penanggulangan terorisme dilaksanakan di bawah payung hukum MoU. Selama tahun 2023, Indonesia melalui BNPT telah melaksanakan kerja sama bilateral dalam penanggulangan terorisme melalui perumusan dan

penandatanganan kesepakatan Kerjasama penanggulangan terorisme dengan negara mitra dengan target capaian kinerja sebanyak 1 (satu) kesepakatan, yaitu **Penandatanganan Pembaruan MoU dengan negara mitra yakni Kementerian Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok.**

Realisasi Kinerja

Pada tanggal 1 November 2023 di Kantor BNPT Jakarta, telah dilaksanakan Penandatanganan MoU Kerja Sama Penanggulangan Terorisme antara Indonesia dan RRT. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala BNPT RI dan Menteri Keamanan Publik RRT, H.E. Wang Xiaohong.

Penandatanganan pembaruan MoU dan pertemuan bilateral antara BNPT RI dan MPS RRT menjadi agenda dalam rangkaian kunjungan Menteri MPS RRT ke Indonesia.

Kedua pihak sepakat untuk meningkatkan kerja sama dan kolaborasi khususnya dalam pertukaran informasi intelijen dalam mendukung penguatan peran Indonesia dan Tiongkok di tingkat regional dan global dalam penanggulangan terorisme. Kedua pihak juga sepakat, implementasi MoU dapat dilaksanakan melalui mekanisme dialog bilateral, saling berbagi informasi intelijen, praktik-praktik terbaik, pelatihan bersama, saling kunjung pejabat tinggi dan lain-lain terkait penanggulangan terorisme.

Selanjutnya, pada tanggal 20 Oktober 2023 di Riyadh, telah dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dalam Pemberantasan Terorisme dan Pendanaan Terorisme antara BNPT RI dan PSS Kerajaan Arab Saudi. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala BNPT RI dan Kepala PSS kerajaan Arab Saudi, H.E. Abdulaziz Muhammed Alhuwarini.

Penandatanganan perjanjian kerjasama bidang penanggulangan terorisme merupakan salah satu dari *deliverables* kunjungan resmi Presiden Republik Indonesia ke Riyadh, Arab Saudi. Dalam kunjungan tersebut, Presiden RI telah melaksanakan pertemuan dengan Putra Mahkota dan Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al-Saud, serta menghadiri KTT ASEAN-GCC.

Faktor Keberhasilan : Terjalannya hubungan Kerjasama Bilateral antara Indonesia dengan negara Mitra.

Capaian target kinerja kegiatan tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan yakni sebesar 1 (satu) Kesepakatan.

b. Pelaksanaan Kerjasama Bilateral dengan Negara-negara di Asia Pasifik dan Afrika

Pelaksanaan kerjasama Bilateral dengan negara-negara di asia pasifik dan afrika ini memiliki target capaian kinerja sebanyak 3 (tiga) kesepakatan, yang terdiri dari:

- 2) Pelaksanaan Konsultasi Bilateral dengan Negara mitra di Asia Pasifik dan Afrika telah dilaksanakan dan diwujudkan dalam pelaksanaan Konsultasi Bilateral dalam bidang penanggulangan terorisme antara Indonesia dengan Australia.**

Realisasi Kinerja

Pada tanggal 14 September 2023, Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Prof. Dr. Rycko Amelza Dahniel, M.Si telah melaksanakan Pertemuan ke-9 Konsultasi Bilateral Penanggulangan Terorisme antara Indonesia dan Australia di Canberra, Australia.

Agenda pertemuan Konsultasi Bilateral kali ini melingkupi pokok bahasan, yaitu: penilaian ancaman terorisme dan prioritas penanggulangan terorisme di masa depan, Informasi terkini mengenai kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia (AIPJ2), prioritas kerja sama pada lingkup bilateral, keterlibatan regional dan multilateral, kerja sama Kepolisian dan Pertahanan dalam penanggulangan terorisme, penanggulangan terkait pendanaan terorisme, penanggulangan ekstremisme kekerasan secara online dan di kalangan pemuda, dan aktivitas kepemimpinan pada regional dan global.

Pertemuan Konsultasi Bilateral ini merupakan momentum kedua negara untuk saling berdiskusi dan berbagi Informasi terkini terkait penanggulangan Terorisme kedua negara serta melanjutkan komitmen untuk melaksanakan kerja sama teknis antara Indonesia dan Australia, khususnya pada isu radikalisme online yang menargetkan pemuda.

Faktor Keberhasilan : Meningkatnya hubungan Kerjasama Bilateral antara Indonesia dengan negara Mitra melalui dialog atau pertemuan dalam rangka bertukar pengetahuan dan pandangan.

Capaian target kinerja kegiatan tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan yakni sebesar 1 (satu) kesepakatan.

- 3) Analisa Perkembangan Terorisme Internasional pada tahun 2023 ini dilaksanakan 1 kali secara virtual dan 2 kali pertemuan fisik di Bogor dan Yogyakarta.

Realisasi Kinerja

Pada tanggal 4 Juli 2023, telah dilaksanakan Rapat Analisa Perkembangan Terorisme Internasional periode Januari – Juni 2023 secara virtual. Rapat bertujuan untuk mengetahui perkembangan aksi terorisme dari berbagai wilayah dunia yang meliputi sebaran serangan terorisme, korban dan pelaku pada periode Januari – Juni 2023. Rapat ini mengulas perkembangan aksi terorisme di berbagai wilayah di dunia, penyalahgunaan internet untuk terorisme, termasuk perkembangan kebijakan repatriasi terhadap WNI yang terasosiasi FTF.

Pada 15 Desember 2023, Direktorat Kerja Sama Bilateral telah melaksanakan kegiatan Rapat Analisa Perkembangan Terorisme Internasional Periode Juli-Desember 2023 di Bogor. Rapat ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait perkembangan terorisme dari berbagai wilayah di dunia dari periode Juli hingga Desember 2023. Informasi perkembangan ini meliputi jumlah serangan yang terjadi, korban dan pelaku serangan, serta isu-isu lainnya yang beririsan

seperti pendanaan terorisme, terorisme di ruang siber, dan *Foreign Terrorist Fighters*.

Secara garis besar, pada periode ini, jumlah serangan dan aksi terorisme banyak terjadi di kawasan Asia Selatan, Afrika, Asia Tenggara, Eropa dan Timur Tengah. Sehingga berkaca pada periode yang sama di tahun 2022, hampir seluruh wilayah mengalami peningkatan jumlah serangan, khususnya sejak Pandemi Covid-19 berakhir, dengan kawasan Asia Selatan menempati posisi teratas

Hasil Rapat Analisa Perkembangan Terorisme Internasional ini akan didokumentasikan menjadi buku Analisa Perkembangan Terorisme Internasional Tahun 2023 untuk diberikan kepada pejabat di lingkungan BNPT maupun K/L terkait sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait penanggulangan terorisme.

Selain itu, Direktrat Kerja Sama Bilateral juga menyusun **buku Analisa Perkembangan Terorisme Internasional pada tahun 2023**. Buku bersumber dari *open source* dan akan mengandung laporan analisis serangan terorisme secara global pada tahun 2023 serta peristiwa penting yang terjadi di berbagai kawasan.

Buku akan berisi gambaran terorisme di Kawasan Timur Tengah; Asia Tengah dan Asia Timur; Asia Selatan; Asia Tenggara; Oseania; Eropa; Amerika Utara dan Amerika Tengah; Amerika Selatan; Afrika dan Afrika Utara; serta isu spesifik seperti perkembangan Kelompok *Right Wing Extremism* (RWE); Serangan Terorisme terhadap Fasilitas Siber (Cyber Terrorism); Perkembangan Kelompok Ethno Nationalist; serta Dampak Konflik Israel dan Hamas.

Pembahasan konten laporan akan dibahas secara padat dan ringkas tanpa mengurangi isi konten, penyajian akan dilakukan secara eksploratif dan deskriptif, terutama dalam topik kewilayahan.

Faktor Keberhasilan : Tersedianya produk analisa perkembangan terorisme internasional.

Capaian target kinerja kegiatan tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan yakni sebesar 1 (satu) kesepakatan.

- 1) Koordinasi dan kerjasama dengan negara mitra dan lembaga lainnya pada Tahun 2023, dilakukan dengan melakukan pertemuan dan koordinasi terkait isu terorisme dan penanggulangannya. BNPT melaksanakan Kunjungan Kerja ke Persatuan Emirat Arab.

Realisasi Kinerja

Pada tanggal 1 – 5 Juni 2023, Delegasi BNPT yang dipimpin oleh Kepala BNPT telah melaksanakan kunjungan kerja ke Persatuan Emirat Arab. Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka melakukan kunjungan kehormatan kepada Direktur Jenderal Dubai State Security (DSS), melakukan pertemuan kelompok ahli dengan DSS, kunjungan kepada Kepala State Security Department (SSD), dan melaksanakan kunjungan ke pusat toleransi beragama di Abu Dhabi.

Dalam rangkaian pertemuan dengan mitra di PEA tersebut, BNPT mendapatkan pandangan baru bahwa terorisme juga merupakan ancaman serius di PEA, sebagai tempat berkumpulnya penduduk dunia. Sehingga toleransi digaungkan dimana – mana untuk memastikan keamanan dalam negeri.

Selanjutnya, Pada 22 – 27 Januari 2023, Kepala BNPT RI beserta delegasi telah melaksanakan Kunjungan dalam rangka Koordinasi dan kerjasama kemitraan dengan Presidency State Security (PSS) dan The Global Center for Combating Extremist Ideology (Etidal).

Kunjungan dan pertemuan tersebut menghasilkan hal-hal konkrit antara lain dengan terlaksananya kunjungan dan pertemuan ke beberapa institusi terkait dengan penanggulangan Terorisme yaitu Pusat Deradikalisasi The Mohammed Bin Nayef Counseling and Care Center (MNCC) dan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan Al-Hair. Terlaksananya Pertemuan High Level Meeting antara BNPT dengan Presidency of State Security (PSS) dan The

Global Center for Combating Extremist Ideology (Etidal) sebagai implementasi Kerja Sama Penanggulangan Terorisme.

Faktor Keberhasilan : Optimalnya upaya penanggulangan terorisme di Indonesia melalui pertukaran informasi dan pengalaman praktik terbaik.

Capaian target kinerja kegiatan tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan yakni sebesar 1 (satu) kesepakatan.

c. Menyepakati Perjanjian Kerjasama Bilateral dengan Negara-negara di Amerika dan Eropa

- 5) Menyepakati perjanjian kerjasama bilateral dengan negara-negara di Amerika dan Eropa ini memiliki target capaian kinerja sebanyak 1 (satu) kesepakatan yaitu koordinasi, monitoring, dan evaluasi perumusan dan penandatanganan kesepakatan Kerjasama penanggulangan terorisme antara Indonesia dengan Prancis.

Realisasi Kinerja

Pada tanggal 25 – 26 September 2023, telah dilaksanakan **Pertemuan ke-1 Joint Working Group on Counter Terrorism** antara Indonesia dan Prancis di Bogor, Jawa Barat, sekaligus dalam rangka monitoring dan evaluasi kerja sama di antara kedua negara. Pimpinan Delegasi RI (Delri) dalam pertemuan tersebut adalah Deputi Bidang Kerja Sama Internasional, BNPT, dan Pimpinan Delegasi Belanda dalam pertemuan tersebut adalah Mr. Joseph COMTOIS, CT and Judicial Expert-Officer, Director for Strategy and International Affairs (DGSI).

Dalam pertemuan tersebut, kedua negara membahas beberapa topik seperti, Penilaian resiko di tingkat global, regional dan nasional, serta prioritas nasional dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme; Tantangan mendeteksi ancaman; Tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan

keamanan; Penanganan terorisme melalui penggunaan alat hukum dan administratif; dan kerja sama teknis.

Berdasarkan hasil pertemuan JWG dan Monev tersebut, kedua negara sepakat membentuk kerja sama teknis yang dapat ditindaklanjuti, diantaranya :

- Kerja sama penegakan hukum melalui :
 - o Pertukaran data intelijen terkait kasus terorisme dan pendanaan terorisme yang melibatkan kedua negara.
 - o Joint analysis di bidang terorisme dan pendanaan.
 - o Pelatihan atau capacity building intelijen di bidang analisis, media sosial, serta pengawasan.
 - o Penanganan barang bukti digital pada kasus terorisme.
- Kerja sama berbagi informasi mengenai jaringan terorisme yang tersebar di berbagai negara khususnya Afrika.

Faktor Keberhasilan : Menguatnya hubungan Bilateral yang telah terjalin melalui evaluasi Kerjasama bilateral dalam bidang penanggulangan terorisme.

Capaian target kinerja kegiatan tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan yakni sebesar 1 (satu) kesepakatan.

d. Pelaksanaan Kerjasama Bilateral dengan Negara-negara di Amerika dan Eropa

Pelaksanaan Kerjasama bilateral dengan negara-negara di Amerika dan Eropa memiliki target capaian kinerja sebanyak 3 (tiga) kesepakatan yaitu,

- 6)** Pelaksanaan *Joint Working group (JWG)* dengan Negara mitra di Amerika dan Eropa telah dilaksanakan dan diwujudkan dalam pelaksanaan JWG dalam bidang penanggulangan terorisme antara Indonesia dengan Slowakia.

Realisasi Kinerja

Pada tanggal 29 Mei 2023, Kepala BNPT didampingi oleh Pimpinan Tinggi dan staf telah melaksanakan ***Joint Working Group (JWG)*** kerja sama penanggulangan terorisme antara Indonesia dan Slowakia.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPT mengawali pertemuan dengan menyampaikan bahwa Republik Indonesia dan Republik Slowakia memiliki hubungan yang sangat erat dalam komitmen menanggulangi terorisme yang diwujudkan dalam Penandatanganan MoU dalam bidang penanggulangan terorisme pada 24 Juni 2019.

Agenda pembahasan pada *Joint Working group (JWG)* yang pertama meliputi penilaian ancaman Terorisme dalam lingkup global, regional, dan nasional; prioritas nasional dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Terorisme; berbagai inisiatif yang telah dilakukan oleh kedua negara baik dalam lingkup regional maupun multilateral; dan tindak lanjut kerja sama sebagai bentuk implementasi dari MoU kerja sama antara kedua negara.

Pada 5 Desember 2023, **Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia telah menghadiri undangan Pemerintah Inggris dalam rangka pelaksanaan *Second Joint Working Group on Counter Terrorism Cooperation***. Pertemuan dipimpin oleh ketua delegasi kedua negara yaitu Chris Felton selaku, Head Asia and Oceania CTEN Network dan Andhika Chrisnayudhanto, Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT. Pertemuan tersebut menghasilkan 8 Key Takeaways kerja sama Penanggulangan Terorisme untuk ditindaklanjuti pada periode 2024/2025 antara lain sebagai berikut:

1. Dukungan kepada Pemerintah Indonesia terkait proyek Rumah Singgah (Halfway House) bagi mantan narapidana teroris (napiter);
2. Dukungan peningkatan kapasitas dan kapabilitas tanggap darurat dan kesiapsiagaan nasional di Pulau Gili yang akan dikerjasamakan dengan JOPP (Joint Overseas Protect and Prepare);
3. Menjajaki potensi proyek bersama atas program-program dan konsep note dibawah kerangka kerja ASEAN;
4. Pembahasan lebih lanjut mengenai usulan Indonesia dalam menyusun Standard Minimum Rules on Children Associated with Terrorism sebagai bagian anggota UNCCPCH dan menjajaki opsi-opsi yang dapat didukung oleh Pemerintah Inggris;

5. Pembahasan lebih lanjut tentang legislative gap penanggulangan terorisme di laut;
6. Pembahasan dan diskusi tentang STRIVE Juvenile;
7. Penjajakan potensi dukungan Inggris terhadap I-Khub BNPT;
8. Memastikan keberlanjutan proyek Moonshot PTUI dengan memanfaatkan mandate BNPT sebagai lembaga koordinator dalam menjamin dukungan penuh dan partisipasi KOMINFO dalam proyek Moonshot;

Faktor Keberhasilan : Meningkatnya hubungan Kerjasama Bilateral antara Indonesia dengan negara Mitra melalui dialog atau pertemuan dalam rangka bertukar pengetahuan dan pandangan

Capaian target kinerja kegiatan tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan yakni sebesar 1 (satu) kesepakatan.

- 7) Pelaksanaan Kunjungan dan Penerimaan Perwakilan negara Mitra telah dilaksanakan dengan pelaksanaan penerimaan kunjungan Keamanan Maritim Pemerintah Kerajaan Inggris, Pelaksanaan Kunjungan ke Department of State dan Northern California Regional Intelligence Center Amerika Serikat.

Realisasi Kinerja

Pada tanggal 16 Juni 2023, telah dilaksanakan **penerimaan kunjungan perwakilan dari Keamanan Maritim Inggris** oleh BNPT yang diwakili oleh Deputi Bidang Kerja Sama Internasional.

Terkait dengan kemaritiman, Indonesia telah menjalin kerja sama dengan Malaysia dan Filipina. Implementasi kerja sama ini adalah ketiga negara melaksanakan operasi militer bersama, saling bertukar informasi dan peningkatan kapasitas para penegak hukum.

Disampaikan bahwa BNPT khususnya Kedeputan Bidang Kerja Sama Internasional tidak memiliki kapasitas membahas tentang kemaritiman. Namun kaitannya dengan terorisme, ancaman yang timbul di wilayah perairan

dikategorikan sebagai 'terorisme di laut' dan Indonesia tidak mendefinisikan maupun mengkriminalisasikan 'terorisme di laut' secara khusus.

Indonesia dinilai memiliki pengalaman dalam menangani persoalan ancaman di kemaritiman dengan melibatkan berbagai kementerian/lembaga. Pihak keamanan maritim Inggris bermaksud menggali peluang kerja sama antara kedua pihak. Pihak Inggris pun sebelumnya telah mengunjungi beberapa lembaga seperti Bakamla.

Inggris terbuka untuk mendukung Indonesia melalui berbagai program salah satunya melalui peningkatan kapasitas personel khususnya yang menangani persoalan di bidang kemaritiman seperti penanganan persoalan perdagangan orang, perpindahan orang dan barang, dan lainnya yang terkait.

Selain itu, pada tanggal 31 Januari – 8 Februari 2023, Kepala BNPT didampingi oleh Deputi Bidang Penindakan Pembinaan Kemampuan; Direktur Kerjasama Bilateral; dan staf telah melaksanakan **kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS)** dalam rangka melaksanakan beberapa kegiatan, meliputi :

- 1) Menghadiri *the 71st National Prayer Breakfast*;
- 2) Pertemuan Bilateral dengan Department of States (DOS);
- 3) *Courtesy Call* dengan Duta Besar RI di Washington DC;
- 4) Pertemuan antara Kepala BNPT dan Konsul Jenderal RI San Francisco, 4 Februari 2023;
- 5) Pertemuan bilateral dengan Northern California Regional Intelligence Center (NCRIC).

Kehadiran Indonesia dalam *the 71st National Prayer Breakfast* menunjukkan komitmen kuat Indonesia untuk terlibat aktif dalam membangun persatuan. Hal ini sejalan dengan upaya BNPT dalam upaya moderasi beragama yang dapat diukur dengan komitmen nasional; toleransi; anti kekerasan dan penerimaan tradisi. BNPT memiliki program yang mendukung pelaksanaan moderasi beragama yakni melalui strategi Pentahelix yakni pelibatan berbagai pihak; vaksin kebangsaan; Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di 34 provinsi; pembangunan Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) dan pembangunan

forum melalui Wadah Rukun Usaha Nurani Gelorakan (WARUNG) NKRI yang saat ini tersebar di 7 provinsi.

Sebagai tindak lanjut, Kepala BNPT mendorong bahwa perlu adanya forum yang serupa seperti *the National Prayer Breakfast* di Indonesia yang dikoordinatori BNPT.

Dalam kaitannya dengan repatriasi, tawaran bantuan dari AS dalam memberikan akses pada assessment, BNPT akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Dalam kaitannya dengan hasil kunjungan NCRIC, BNPT berharap hasil kunjungan ini menjadi salah satu upaya untuk kerja sama utamanya dalam sharing best practices dari masing-masing negara.

NCRIC menyampaikan bahwa pembangunan fusion center dapat dimulai di wilayah daerah dengan melibatkan lembaga yang berada di daerah seperti kepolisian, intelijen, dan lembaga terkait lainnya. NCRIC mendukung upaya BNPT dalam memperkuat operasionalisasi Pusdalsis. NCRIC siap mendukung dalam upaya tersebut.

Faktor Keberhasilan : Optimalnya upaya penanggulangan terorisme di Indonesia melalui pertukaran informasi dan pengalaman praktik terbaik.

Capaian target kinerja kegiatan tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan yakni sebesar 1 (satu) kesepakatan.

- 8) Pelaksanaan Penggalangan Mitra dalam rangka pengembangan jejaring intelijen dengan negara mitra tahun 2023 telah dilaksanakan penggalangan dengan beberapa negara antara lain Singapura, Uni Emirat Arab, Republik Rakyat Tiongkok, Inggris, Thailand, Amerika Serikat, Australia, Rusia, Slovakia, Bahrain, Vietnam, Arab Saudi, Maroko, Belgia, dan Austria

Faktor Keberhasilan : Tersedianya Informasi terkait dengan perkembangan terorisme dari negara lain.

Capaian target kinerja kegiatan tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan yakni sebesar 1 (satu) kesepakatan.

Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral

Kesepakatan pada kerja sama dalam mekanisme ASEAN dan Organisasi Regional lainnya.

- a) Melalui mekanisme SOMTC/AMMTC, Indonesia sebagai *voluntary lead shepherd* pada isu penanggulangan terorisme di ASEAN merupakan *Co-Chairs Working Group on CT* telah terlibat aktif dalam penyelenggaraan: Pertemuan *1st Working Group on General Transnational Crime Matters* di Jakarta pada 20 Maret 2023, membahas dinamika kejahatan transnasional, serta isu-isu kejahatan transnasional yang belum terwadahi di dalam mekanisme *working group* yang sudah ada. Pertemuan ini juga membahas rekomendasi *ASEAN Joint Consultative Meeting (JCM)* agar SOMTC dapat menjadi *Lead Sectoral Body* pada pembahasan lintas sektor untuk isu-isu *Environmental Crime, Money Laundering and International Economic Crime*, serta *People Smuggling*, perluasan isu *Sea Piracy*, menjadi isu prioritas "*Non-Traditional Maritime Crime*", mereview efektivitas 10 (sepuluh) area prioritas kejahatan transnasional di SOMTC, dan kemungkinan rotasi dari peran *Lead Shepherd* pada masing-masing area prioritas.

Untuk mendukung implementasi dan memperkuat monitoring dan evaluasi Bali Work Plan, sebagai kerangka kerja dari *ASEAN Plan of Action to Prevent and Counter the Rise of Radicalisation and Violent Extremism 2019-2025*, BNPT bekerja sama dengan USAID PROSPECT telah menyelenggarakan "*The 3rd Bali Work Plan Multi-Sectoral Task Force (MTF) Meeting*" dan "*The 3rd ASEAN Partners Meeting*" dilaksanakan secara *back-to-back* di Bali, 8 Juni 2023, dimana melalui pertemuan tersebut mendiskusikan dan mencatat capaian implementasi Bali Work Plan sebanyak 117 kegiatan indikatif (39,32%) telah dilaksanakan oleh *ASEAN Sectoral Bodies/Organs/Entities* terkait selama periode 2019-2023.

Pelaksanaan “*The 19th SOMTC Working Group on Counter Terrorism*” di Bali, 18 Mei 2023, membahas mengenai perkembangan terkini ancaman ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme di Asia Tenggara, strategi nasional serta internasional dalam menghadapinya. Pertemuan juga membahas status kerja sama yang telah disepakati sebelumnya, dan mendiskusikan sumber daya maupun tindakan yang perlu diambil menghadapi isu-isu yang mengemuka lainnya.

Pertemuan *The 23th ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime and Its Related Meetings* yang diselenggarakan di Yogyakarta, 18-23 Juni 2023 yang membahas perkembangan kejahatan lintas batas negara di kawasan ASEAN serta perkembangan upaya bersama dalam pencegahan dan penanggulangannya. *ASEAN Member States (AMS)* menyetujui resirkulasi sejumlah rancangan dokumen deklarasi untuk pertimbangan input dan masukan AMS, untuk kemudian dapat didorong pengesahannya di pertemuan AMMTC.

Lebih lanjut dalam mendukung keketuaan Indonesia di ASEAN di tahun 2023, pada pertemuan AMMTC ke-17 di Labuan Bajo, 20-24 Agustus 2023, BNPT telah menginisiasi salah satu inisiatif yang menjadi deliverables pada mekanisme *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crimes (AMMTC)*, melalui keberhasilan pengesahan *ASEAN Declaration on Developing Regional Early Warning and Early Response (EWER) Capability to Prevent and Counter the Rise of Radicalisation and Violent Extremism (PCRVE.)*

Telah dilaksanakan juga Rapat Koordinasi Hasil Pertemuan AMMTC ke-17 Tahun 2023 di Bali, 10-13 Desember 2023 yang merupakan tindak lanjut pengesahan *Labuan Bajo Declaration on Advancing Law Enforcement Cooperation in Combating Transnational Crime* yang menjadi salah satu dari tiga deklarasi ASEAN inisiatif Indonesia pada AMMTC ke-17.

Kesepakatan pada pelaksanaan kerjasama dalam mekanisme ASEAN.

Telah dilaksanakan kerja sama teknis dan pengembangan kapasitas, diantaranya:

- a) *ASEAN-EU Regional Workshop on the Development of Promising Practices Related to Deradicalisation, Rehabilitation, and Reintegration Programmes*, bekerja sama dengan Uni Eropa melalui ESIWA Project, 1-3 Maret 2023 di Bali. *Workshop* menghasilkan dokumen “*ASEAN Handbook on “Promising Practices on Deradicalisation, Rehabilitation and Reintegration of Prison Inmates related to Terrorism and Violent Extremism”*” sebagai panduan yang berguna bagi para pengambil keputusan untuk menciptakan dan melaksanakan program rehabilitasi dan reintegrasi yang efektif.
- b) *ASEAN-Australia Workshop to Exchange Practices on Community Resilience Programmes to Counter-Radicalisation and Violent Extremism*, bekerja sama dengan Pemerintah Australia, Agustus 2023 di Bali, 16-17 Mei 2023, menghasilkan dua *outcome document*, berupa *Key Takeaways* dan *Compilation of Good and Promising Practices terkait Community Resilience in CRVE* di ASEAN.
- c) Pelaksanaan *2nd ASEAN-AUSTRALIA Counter Terrorism Dialogue*, di Bali pada 19 Mei 2023.
- d) *The 3rd ASEAN-U.S. Regional Workshop on PCVE: Community Resilience to Prevent and Counter Radicalism and Violent Extremism in ASEAN*, 6-7 Juni 2023 di Bali, bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat melalui ASEAN-USAID PROSPECT, menghasilkan dokumen *Non-Binding Recommendations* yang berisikan rekomendasi-rekomendasi yang menjadi panduan bagi ASEAN dan Amerika Serikat dalam mengangkat isu/tema kerja sama pengembangan kapasitas ke depan.
- e) Partisipasi dalam pertemuan *AICHR Consultation on Victims- Oriented Protection to Prevent and Counter Radicalism and Violent Extremism in ASEAN* di Bali, 9-10 Juni 2023.
- f) Partisipasi pada pertemuan *ASEAN WPS Summit: High-Level Dialogue to Advance the Implementation of the Regional Action Plan on Women Peace and Security* di Yogyakarta, pada 6 Juli 2023.

Kesepakatan pada pelaksanaan kerjasama dalam mekanisme Organisasi Regional lainnya

- a) *ASEAN Regional Forum (ARF) Workshop on Anti Money Laundering and Financial Terrorism* di Bali, 7-11 Maret 2023. BNPT menjalin koordinasi aktif dengan Kemenlu selaku focal point ARF dalam upaya memperkuat diplomasi pada isu penanggulangan terorisme dalam forum ARF.
- b) Partisipasi pada pertemuan *Strategic Information Exchange ASEAN Our Eyes* di Jakarta, pada 10-12 April 2023
- c) *ASEAN Political Security Community (APSC) Council* di Bandung, 14 April 2023. BNPT juga aktif berkoordinasi dengan K/L terkait dalam upaya mendorong keberhasilan keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023.
- d) Pertemuan *The 3rd Senior Officials Counter-Terrorism Policy Forum (SOCTPF)* di Australia, 13-17 November 2023 menghasilkan pada pelaksanaan SRM 2024, Indonesia akan menjadi tuan rumah dan waktu pelaksanaannya menyesuaikan dengan Pemilu 2024 mengingat Menko Polhukam sedang menjadi kandidat Cawapres. Adapun pertemuan SOCTPF 2024 yang akan menjadi *co-chair* adalah Singapura dan Filipina.
- e) Pelaksanaan *Roundtable on the Repatriation of Children from the Displacement Camps of North-East Syria: Perspectives from EU Member States and Indonesia*, di Jakarta, pada 15 Desember 2023.

Kesepakatan pada kerja sama dalam mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Multilateral lainnya.

Inisiatif dan kepemimpinan Indonesia dalam bidang penanggulangan terorisme telah mendapatkan apresiasi dan kepercayaan dari dunia internasional, antara lain:

- a) BNPT telah berpartisipasi pada Sesi ke-32 Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana/*The 32nd Session of Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ)* di Wina, 22-27 Mei 2023. Pertemuan ke-32 tahun ini mengangkat tema “*Enhancing the functioning of the criminal justice system to ensure access to justice and realize a safe and secure society*”. Selain mewakili Pemri, BNPT menyampaikan *national statement* terkait dengan *access to justice*. Pada forum ini BNPT menjadi *co-sponsor* pada beberapa *side event*, yaitu:

- *“Accelerating Uptake of Evidence-Based Approaches for Preventing and Responding to Violence Against Children”*, 23 Mei 2023. Side event tersebut diselenggarakan oleh WHO dengan didukung oleh UNODC Prevention, Treatment and Rehabilitation Section dan the UNODC Crime Prevention and Criminal Justice Section dengan tujuan untuk memberikan gambaran upaya-upaya yang telah dilakukan oleh UNODC dan WHO dalam mengakhiri kekerasan terhadap anak, serta mendiskusikan gagasan yang mendorong berbagai pihak secara kolektif dapat turut berkontribusi dalam upaya tersebut.
- *“Ratification and Implementation of the international instruments to prevent and combat terrorism”*, 24 Mei 2023. Indonesia mencatat pentingnya pemantauan implementasi Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional dan protokolnya untuk memerangi kejahatan transnasional terorganisir. Indonesia menegaskan kembali dukungannya terhadap mekanisme peninjauan UNTOC, dan siap untuk berkoordinasi lebih erat dengan UNODC dan negara-negara anggota terkait kemajuan peninjauan, baik sebagai peninjau maupun negara yang sedang ditinjau.
- *“Promoting a Southeast Asia Regional Network of PVE Practitioners (SEAN-PVE)”*, 25 Mei 2023. Side event dilaksanakan secara hybrid dan disponsori oleh UNODC bersama Pemri. Forum bertujuan untuk berbagi praktik baik dalam mempromosikan pendekatan pencegahan terhadap ekstremisme kekerasan dan terorisme, menyoroti kemajuan yang dibuat dalam membangun jaringan dan hasil yang dicapai, sebagai model potensial untuk kawasan lain.
- *“SDG16: Accelerating Progress to Achieve Justice for Children in all contexts, including counterterrorism & digital justice innovations”*, 25 Mei 2023. Side event dilaksanakan secara hybrid dan disponsori oleh pemerintah Brazil, dengan co- sponsor pemerintah Canada, Indonesia, Belanda, Thailand, serta Baker McKenzie, the Legal Empowerment Fund and the Organisation for Economic Co-operation and Development.

- b) Bertepatan dengan pelaksanaan Pertemuan untuk adopsi *8th Review of Global Counter Terrorism Strategy (GCTS)*, Kepala BNPT telah menghadiri *the 3rd High Level Conference on Counter Terrorism* di New York, Amerika Serikat, 19-23 Juni 2023, yang mengangkat tema “*Addressing Terrorism through Reinvigorated Multilateralism and Institutional Cooperation*”. Forum menjadi sarana bagi Pemri untuk menyampaikan komitmen dukungannya terhadap GCTS dan menekankan pentingnya mempromosikan penghormatan terhadap keberagaman dan toleransi sebagai bentuk investasi dalam pencegahan, penguatan kerja sama internasional termasuk kerjasama regional dan sub-regional dalam pengembangan kapasitas dan pertukaran praktik baik, serta penguatan *multi-stakeholder engagement*.
- c) Dalam rangka memperkuat peran *Indonesia Knowledge Hub on Counter Terrorism and Violent Extremism (I-KHUB on CT/VE)* sebagai pusat informasi dan kolaborasi upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan melalui *platform digital*, I-KHub BNPT pada 5 Juli 2023 meluncurkan produk pengetahuan yang terdiri dari *Outlook on CT/VE 2023, Policy Analysis* dan *Commentaries*.
- d) Dalam rangka pelaksanaan Pertemuan ke-9 *Heads of Intelligence and Security Services Concerning ISIL (Da'esh) and Al Qaida Influences in SouthEast Asia* 2024, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi di Yogyakarta, 8-9 November 2023 mengundang K/L terkait untuk membahas persiapan substantif, teknis dan komposisi delegasi kegiatan tersebut.
- e) Kepala BNPT telah mewakili Pemri dalam peluncuran *Strategy to End Violence against Children 2023-2030* yang berlangsung di Kantor PBB di Wina, Austria, 28 November 2023. Undangan ini merupakan pengakuan atas komitmen dan inisiatif kepemimpinan Indonesia di kawasan dalam melindungi anak-anak dari kekerasan termasuk kekerasan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan.
- f) BNPT mewakili Pemerintah Indonesia telah berpartisipasi pada *GCERF: The 19th GCERF Board meeting* di Jenewa pada 29-30 November 2023, guna meresmikan keanggotaan Indonesia sebagai negara mitra baru GCERF, menyepakati 19 keputusan strategi GCERF ke depannya, termasuk strategi implementasi, perluasan kinerja, laporan komite keuangan, dan audit serta tata kelola.

Kesepakatan pada pelaksanaan kerja sama dalam mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kesepakatan dilaksanakan melalui kerjasama teknis melalui sejumlah program kegiatan, antara lain:

a) UNODC bekerjasama dengan BNPT didukung oleh Uni Eropa melalui *STRIVE Juvenile Project: Preventing and Responding to Violence Against Children by Terrorist and Violent Extremist Groups* sejak 2021. Program ini mencakup beberapa aktivitas, antara lain penelitian, mempromosikan pembuatan kebijakan yang berbasis bukti, partisipatif dengan dasar pendekatan yang sensitif anak dan gender (pencegahan dan respon yang tepat terhadap fenomena anak yang terasosiasi dengan kelompok-kelompok teroris); peningkatan kemampuan yang dirancang khusus untuk para ahli yang bekerja di bidang ini, disesuaikan dengan kebutuhan dan perannya masing-masing; serta mendorong intervensi yang ditujukan untuk membina partisipasi anak-anak dan lingkungannya dalam pengambilan keputusan, termasuk juga keikutsertaan mereka di upaya pencegahan dan reintegrasi. Pada 2023 telah diselenggarakan:

- *1st Training of Trainers on Basic Knowledge to Support the Psychosocial Assessment Process for Children Associated with Terrorist and Violent Extremist Groups*, di Jakarta, pada 15-17 Maret 2023.
- *1st National Led - Training Workshop on Basic Knowledge to Support the Psychosocial Assessment Process for Children Associated with Terrorist and Violent Extremist in Solo*, di Solo, pada 22-25 Mei 2023.
- *1st National Led - Training Workshop on Basic Knowledge to Support the Psychosocial Assessment Process for Children Associated with Terrorist and Violent Extremist in Palu*, di Palu, pada 13-16 Juni 2023.
- *1st National Led - Training Workshop on Basic Knowledge to Support the Psychosocial Assessment Process for Children Associated with Terrorist and Violent Extremist in Mataram*, di Mataram, pada 19-22 Juni 2023.
- *2nd Training of Trainers on Basic Knowledge to Support the Psychosocial Assessment Process for Children Associated with Terrorist and Violent Extremist Groups*, di Jakarta, pada 12-14 Juli 2023.

- *The 2nd Meeting of the Scientific Advisory Committee STRIVE Juvenile, secara virtual, pada 14 Juli 2023.*
- *2nd National Led - Training Workshop on Basic Knowledge to Support the Psychosocial Assessment Process for Children Associated with Terrorist and Violent Extremist in Solo, di Solo, pada 21-26 Agustus 2023.*
- *2nd National Led - Training Workshop on Basic Knowledge to Support the Psychosocial Assessment Process for Children Associated with Terrorist and Violent Extremist in Palu, di Palu, pada 28 Agustus-2 September 2023.*
- *FGD Lanjutan Panduan Mekanisme Koordinasi Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme, di Jakarta, 7 September 2023.*
- *2nd National Led - Training Workshop on Basic Knowledge to Support the Psychosocial Assessment Process for Children Associated with Terrorist and Violent Extremist in Mataram, di Mataram, pada 11-13 September 2023.*
- *3rd Training of Trainers on Basic Knowledge to Support the Psychosocial Assessment Process for Children Associated with Terrorist and Violent Extremist Groups, di Jakarta, pada 17-19 Oktober 2023.*
- *Roundtable Meeting to validate the Guidance Note on Psychosocial Assessment Process for Children Associated with Terrorist and Violent Extremist Groups, di Jakarta, pada 20 Oktober 2028.*
- *3rd National Led - Training Workshop on Basic Knowledge to Support the Psychosocial Assessment Process for Children Associated with Terrorist and Violent Extremist in Solo, di Solo, pada 6-9 November 2023.*
- *3rd National Led - Training Workshop on Basic Knowledge to Support the Psychosocial Assessment Process for Children Associated with Terrorist and Violent Extremist in Palu, di Palu, pada 20-23 November 2023.*
- *3rd National Led - Training Workshop on Basic Knowledge to Support the Psychosocial Assessment Process for Children Associated with Terrorist and Violent Extremist in Mataram, di Mataram, pada 28-30 November 2023.*

b) BNPT bekerja sama dengan UNODC-UNICRI-OPCW melalui Project *“Building a Safer South-East Asia by Preventing and Responding to the Use of Chemical Weapons by Terrorists and Other Non-State Actors in Indonesia”* guna meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan pemerintah dan sektor industri dalam mencegah, deteksi dan merespon resiko serta ancaman terorisme kimia, termasuk mendukung penyusunan dokumen strategis yang kiranya dapat menjadi acuan pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan, khususnya dalam kaitan penanggulangan terorisme kimia. Dalam implementasi project ini, BNPT dan UNODC-UNICRI-OPCW telah melaksanakan kegiatan antara lain:

- *Inter-Agency Workshop for Preventing and Responding to Chemical Weapons Incidents in Indonesia*, di Bogor pada 3-6 April 2023.
- *Training and Simulation Exercise on Rapid Response Capabilities to Chemical Weapons Terrorism (Batch 1)*, di Semarang, pada 3-7 Juli 2023.
- *2nd Inter-Agency Workshop on Responding to Chemical Weapons Incidents in Indonesia*, di Yogyakarta, pada 23-24 Agustus 2023.
- *Workshop on Strengthening Implementation of International Legal Instruments Against Proliferation on Chemical Weapons by non-State Actors, in Particular for Terrorist Purposes*, di Bogor, pada 13-14 September 2023.
- *1st Consultation Meeting for the Development of a Policy Paper to Prevent and Respond to Chemical Terrorism in Indonesia*, di Jakarta, pada 20-21 November 2023.
- *Expert Dialogue on: “Technology and Security: Prevention, Detection and Response to Chemical Terrorism and Organized Criminal Activities”*, di Jakarta, pada 22-23 November 2023.
- *Training and Simulation Exercise on Rapid Response Capabilities to Chemical Weapon Terrorism (Batch 2)*, di Semarang, pada 27 November-1 Desember 2023

- c) BNPT bekerja sama dengan UNOCT melalui *Global Programme on Countering Terrorist Threats against Vulnerable Target*, telah menghasilkan *Roadmap to Strengthen the Protection of Vulnerable Targets against Terrorist Threats*, dan telah melaksanakan:
- *Workshop to Raise Awareness and Launch the Roadmap on Countering Terrorist Threats Against Vulnerable Targets in Indonesia* di Jakarta, pada 11-14 April 2023.
 - *Strategic Level Table-Top Exercise*, di Bogor, pada 23-25 Oktober 2023.
- d) BNPT bekerja sama dengan UNOCT melalui program *PCVE Crisis Communication in Indonesia and the Region* telah melaksanakan:
- *Workshop on Crisis & Strategic Communications for PCVE in Indonesia through A Whole of Government and A Whole of Society Approach*, di Yogyakarta pada 22-24 Februari 2023.
 - *Regional Workshop on Crisis & Strategic Communication for PCVE in South-East Asia through a Whole-of-Government and Whole-of-Society Approach*, di Bangkok, pada 3-6 April 2023.
- e) BNPT bekerja sama dengan UNODC melalui program *Enhancing Knowledge, Operational Capacities, and Cross-border Information Sharing to Counter Threats Posed by Foreign Terrorist Fighters in Indonesia, Malaysia and the Philippines* yang didanai oleh Pemerintah Australia telah menyelenggarakan:
- *Fundational Multi-Agency Training for Law Enforcement and Intelligence Officer on Foreign Terrorist Fighters*, di Manado, pada 23-24 Mei 2023.
 - *Specialized Multi-Agency Training for Law Enforcement and Intelligence Officers on Foreign Terrorist Fighters*, di Balikpapan, pada 4-8 Desember 2023.

f) BNPT bekerja sama dengan UNODC melalui program *Regional Network of Prevention of Violent Extremism (PVE) Practitioners of South-East Asia (SEAN-PVE)* telah menyelenggarakan:

- *First Meeting of The Advisory Board of The Preparatory Working Group on Developing a Regional Network of PVE Practitioner of Southeast Asia*, di Jakarta, pada 7-8 Maret 2023.
- *Working Groups on Youth Empowerment and Strategic Communication within the Framework of the Preparatory WG on Developing a Regional Network on PVE Practitioners of Southeast Asia*, di Kuala Lumpur, pada 28-29 Maret 2023.
- *Regional Meeting of Thematic Working Group on Rehabilitation and Reintegration* pada tanggal 26-27 Juni 2023 di Singapura.

g) BNPT bekerja sama dengan UNODC melalui program *The Strengthening Resilience Against Violent Extremism in Asia (STRIVE Asia)* yang didukung oleh Uni Eropa-PBB, telah menyelenggarakan:

- *Cross Regional Exchange to Strengthen Partnership in Promoting Resilience against Violent Extremism in Central and Southeast Asia*” pada 25-27 April 2023 di Istanbul, Turki,
- *Regional Dialogue on Multi Sectoral Partnership to Prevent Violent Extremism in Southeast Asia* pada 27 November 2023 - 1 Desember 2023 di Penang, Malaysia
- *Regional Workshop on Strategic Communication for Preventing Violent Extremism* pada 11-15 Desember 2023 di Bali.

h) Pada 2023 BNPT memulai kerja sama dengan UNOCT, UNODC, ICAO, CTED, INTERPOL melalui *Counter Terrorist Travel Program* yang memfasilitasi akses terhadap pengetahuan teknis dan

gambaran komprehensif tentang sistem pengelolaan API/PNR, serta membentuk jejaring profesional yang tergabung dalam Pokja Internasional/*International Working Group (IWG)* di Asia Tenggara.

Kesepakatan pada pelaksanaan kerja sama dalam mekanisme Organisasi Multilateral lainnya.

Kesepakatan dilaksanakan melalui kerja sama teknis melalui sejumlah program kegiatan, antara lain:

- a) Kerja sama Indonesia-Australia melalui *Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2)*. Kerja sama teknis difokuskan pada pembangunan dan pengembangan I-KHUB, antara lain meliputi dukungan SDM untuk pengelolaan I-KHub BNPT, dukungan pengembangan *platform* I-KHUB, pengembangan fitur laporan RAN PE pada *platform* I-KHUB dan perawatan berkala (*maintenance platform*).
- b) Kerja sama teknis dengan Hedayah Center yang meliputi:
 - Pelaksanaan Pelatihan Pembangunan Kapasitas: Mendukung Keluarga dalam Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan (*Supporting Families in Countering Violent Extremism*) “Pendekatan Multi-Agensi dan Praktik Baik di Tingkat Daerah”, di Jakarta, pada 14 Maret 2023.
 - Pelaksanaan *Hedayah Fase III: Capacity Building Workshop on Multi-Agency Coordination East Java*, di Surabaya, pada 8-12 Mei 2023.
 - Partisipasi pada *Hedayah International CVE Research Conference*, secara virtual pada 11-13 Oktober 2023.
 - Pelaksanaan *Hedayah Regional Workshop on Online Violent Extremism* di Jakarta pada 30 Oktober-2 November 2023.
- c) Kerja sama dengan *The International Institute for Justice and the Rule of Law (IJJ)*, melalui kegiatan:
 - Partisipasi pada *IJJ Juvenile Justice Initiative: Southeast Asia Regional Workshop on Justice for Children in a Counter- Terrorism Context* di Manila, pada 7-11 Maret 2023.

- Pelaksanaan *Subregional Workshop “IJJ Juvenile Justice Initiative: Child-Sensitive Approaches for Southeast Asian Practitioners in a Counter-Terrorism Context”* di Bali, pada 10-12 Oktober 2023.
- Pelaksanaan *Capacity Building Activity: Enhancing Oversight and Accountability Mechanism of Counter-Terrorism*
- *Operations* di Jakarta, pada 31 Oktober-2 November 2023.

Direktorat Perangkat Hukum Internasional

Berikut merupakan poin rincian dari pelaksanaan rangkaian program kegiatan selama tahun 2023 hingga diperoleh **8 Rekomendasi Kebijakan**, antara lain:

- a. Pada output “Partisipasi Aktif dalam Konvensi dan Resolusi Penanggulangan Terorisme Internasional” telah **mencapai target kinerja hingga 100% (empat rekomendasi kebijakan)** dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penguatan peran dan posisi Indonesia dalam implementasi konvensi internasional di bidang penanggulangan terorisme dan pendanaan terorisme.

Pada tahun 2023, telah dilaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka implementasi perangkat serta standar hukum internasional seperti konvensi internasional di bidang penanggulangan terorisme dan penanggulangan pendanaan terorisme.

- Pelaksanaan partisipasi aktif dalam *Financial Action Task Force (FATF) Plenary* di Paris – Prancis, beserta dengan rangkaian kegiatannya untuk memenuhi kepatuhan dan efektivitas Indonesia menjadi anggota penuh FATF. BNPT utamanya berperan pada pemenuhan efektivitas *Immediate Outcome (IO) 9 (terrorist financing investigation & prosecution)* yang memperoleh nilai *substantial*. BNPT juga berpartisipasi aktif dengan K/L terkait dalam mempertahankan nilai *substantial* pada *IO 1 (risk, policy and coordination)* dalam *FATF Plenary*. BNPT juga terlibat dalam pembahasan *IO 10 (Targeted Financial Sanction)*, serta terlibat aktif mendukung upaya pemenuhan *action plan* pada *IO 3 (supervision)* terkait pembentukan

dokumen *Sectoral Risk Assessment* (SRA) Tindak Pidana Pendanaan Terorisme pada sektor industri berisiko tinggi.

- Pasca Indonesia menjadi anggota penuh FATF, telah dibentuk Tim Bersama Keanggotaan Penuh Indonesia di FATF untuk memperkuat komitmen dan pemenuhan kewajiban Indonesia. BNPT mendukung peran aktif Pemerintah RI sebagai anggota FATF, melalui peran Deputy Bidang Kerja Sama Internasional BNPT sebagai Wakil Ketua 1 Tim Bersama, serta perwakilan Direktorat PHI BNPT dalam keanggotaan Tim.
- Pelaksanaan partisipasi aktif dalam Sesi Tahunan ke-61 *Asian-African Legal Consultative Organization* (AALCO) di Bali. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen kuat membentuk pandangan bersama negara-negara Asia-Afrika dalam bidang hukum internasional terkait aspek keamanan, pertahanan, lingkungan, dan sebagainya. Pada forum internasional ini terdapat pengukuhan dukungan negara-negara AALCO terhadap Palestina sehubungan dengan kependudukan Israel.
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Upaya Deteksi dan Monitoring Pendanaan Teror terhadap Data Individu FTF yang Tervalidasi. Kegiatan ini merupakan bentuk pertukaran informasi dengan K/L terkait untuk pengayaan data *watchlist* khususnya sumber data WNI terasosiasi FTF yang tervalidasi.
- Pelaksanaan partisipasi aktif dalam *Community Engagement and Public Awareness Training for Law Enforcement* di Manila, Filipina. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih APH dan petugas terkait dalam berkoordinasi dan melakukan pendekatan dengan sektor industri dan pelaku usaha guna mengatasi perolehan *dual-use goods* untuk pengembangan senjata kimia.
- Berpartisipasi aktif dalam Penyusunan Posisi Pemri pada Pembentukan Konvensi PBB Melawan Kejahatan Siber untuk Persiapan AHC-7. Berkaitan dengan pembentukan konvensi ini, Indonesia mengusulkan perpanjangan mandat *extensión Ad Hoc* sampai dengan September 2024.

Dari kegiatan-kegiatan tersebut telah dihasilkan **1 (satu) rekomendasi kebijakan terkait penguatan peran dan posisi Indonesia dalam**

implementasi konvensi internasional di bidang penanggulangan terorisme dan pendanaan terorisme.

- 2) Penguatan komitmen implementasi resolusi internasional dan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut pembahasan terkait resolusi internasional.

Pada tahun 2023, telah dilaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka menguatkan komitmen implementasi resolusi internasional dan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut terkait resolusi internasional baik di bidang penanggulangan terorisme maupun bidang penanggulangan pendanaan terorisme.

- Pelaksanaan partisipasi aktif dalam UNODC *Regional Conference on Exploitation of NPOs by Terrorist Group in Thailand, Indonesia, Malaysia, and the Phillipines*, di Phuket, Thailand. Kegiatan ini melibatkan para pemangku kepentingan di bidang penanggulangan pendanaan terorisme dari keempat negara tersebut. Hal ini sehubungan dengan risiko penyalahgunaan NPO merupakan salah satu risiko tertingi dalam aktivitas pendanaan terorisme secara global maupun regional.
- Pelaksanaan partisipasi aktif dalam ARF *Workshop on Anti Money Laundering and Financial Terrorism* di Bali yang melibatkan sejumlah negara di wilayah Asia Pasifik (termasuk Australia). Kegiatan ini nantinya akan ditindaklanjuti oleh Uni Eropa dengan penyusunan *handbook* terkait penanggulangan pendanaan terorisme.
- Berpartisipasi aktif dalam rangkaian Penyusunan Laporan Implementasi Konvensi Menentang Penyiksaan. BNPT selaku Pemri berkontribusi pada pemenuhan Rekomendasi No.36, bahwa Indonesia telah memiliki langkah-langkah untuk merespon ancaman terorisme dan ancaman pendanaan terorisme dengan memperhatikan aspek perlindungan HAM dalam hukum internasional yang berlaku, khususnya Resolusi DK PBB 1624 (2005), serta melakukan upaya peningkatan kapasitas yang relevan terhadap APH guna memahami aspek perlindungan HAM dalam penanggulangan terorisme dan penanggulangan pendanaan terorisme.

- Pelaksanaan partisipasi aktif pada rangkaian kegiatan *Youth, Gender, and Preventing Violent Extremism in South East Asia Events* yang melibatkan para *expert* dan elemen pemerintah dari Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Konferensi dan *workshop* antara lain berkaitan dengan aspek *youth, gender & preventing VE* baik pada praktik lapangannya maupun ketentuan atau internasional seperti Resolusi DK PBB 2250 (2015).
- Pelaksanaan partisipasi aktif (baik sebagai pembicara maupun peserta) pada *Capacity Building Activity: Enhancing Oversight and Accountability Mechanisms of Counter Terrorism Operations in Southeast Asian Countries*. Kegiatan melibatkan negara-negara Asia Tenggara dan Asia Selatan serta membahas hal-hal terkait penanggulangan terorisme dan perlindungan HAM sebagaimana Resolusi MU PBB 63/172 yang juga sejalan dengan Resolusi DK PBB 1373 (2001).
- Rapat Tindak Lanjut Terkait Konferensi Internasional Tingkat Menteri ke-4 'No Money For Terror' (NMFT) Tahun 2023. Kegiatan untuk mempersiapkan tanggapan terkait kesediaan dan kesiapan Pemerintah Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Internasional Tingkat Menteri ke-4 'No Money For Terror' (NMFT).

Berdasarkan kegiatan-kegiatan tersebut di atas telah diperoleh **1 (satu) rekomendasi kebijakan terkait penguatan komitmen implementasi resolusi internasional dan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut pembahasan terkait resolusi internasional.**

- 3) Penggalangan mitra kerja pada bidang konvensi dan resolusi internasional. Pada tahun 2023, penggalangan mitra dalam penanggulangan terorisme dan penanggulangan pendanaan terorisme pada bidang konvensi internasional dan resolusi internasional dilakukan dengan negara-negara mitra seperti Australia, India, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belanda, dan mitra-mitra luar negeri lainnya. Pada beberapa mitra dilakukan beberapa kali pertukaran informasi. Selain itu, dilakukan pula koordinasi terkait dengan identitas-identitas individu dan/atau entitas atau organisasi teroris yang masih terkait dengan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris

(DTTOT). Berdasarkan kegiatan-kegiatan tersebut dihasilkan **1 (satu) rekomendasi kebijakan, yang terdiri dari pertukaran informasi dengan negara-negara mitra serta mitra luar negeri, dan perkembangan terkait individu dan entitas yang masih terkait dengan identitas dalam DTTOT.**

4) Operasionalisasi tim penanggulangan pendanaan terorisme / *Counter Terrorist Financing* (CTF).

Selama satu tahun anggaran 2023 telah dilaksanakan operasional Tim CTF BNPT, yang antara lain melaksanakan pemutakhiran Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) sebagai upaya pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme. Tim CTF dalam pelaksanaan operasionalnya antara lain berperan dalam mengoptimalkan pencegahan melalui analisis dan pemantauan berbasis risiko. Kegiatan operasional Tim CTF telah menghasilkan **1 (satu) rekomendasi kebijakan, yang terdiri dari 8 rekomendasi pemutakhiran DTTOT, baik untuk pencantuman (*listing*) maupun untuk penghapusan (*delisting*), 3 rekomendasi untuk pencantuman kembali (*renewal*), 1 informasi terkait upaya penghapusan identitas dari DTTOT, dan rangkaian laporan operasional Tim CTF selama satu tahun anggaran.**

b. Pada output “Partisipasi Aktif BNPT dalam Upaya Perlindungan WNI di Luar Negeri dari Tindak Pidana Terorisme” telah **mencapai kinerja hingga 100% (dua rekomendasi kebijakan)** dengan rincian sebagai berikut:

1) Melakukan Koordinasi Perlindungan WNI dari Ancaman Tindak Pidana Terorisme di Luar Negeri.

Pada tahun 2023, telah dilaksanakan dua (2) kegiatan dalam rangka upaya perlindungan WNI di luar negeri dari ancaman terorisme yang menghasilkan **1 (satu) rekomendasi kebijakan** terkait Koordinasi Perlindungan WNI di Singapura dan Malaysia dari Tindak Pidana Terorisme. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai satu rekomendasi kebijakan, antara lain:

- Kegiatan Diseminasi dan Koordinasi Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dalam Rangka Pelindungan WNI di Singapura; dan
- Kegiatan Diseminasi dan Koordinasi Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dalam Rangka Pelindungan WNI di Malaysia.

2) Penggalangan Mitra Bidang Perangkat Hukum Internasional.

Kegiatan ini menghasilkan **1 (satu) rekomendasi kebijakan** pengumpulan informasi intelijen terkait ancaman terorisme dan strategi penggalangan intelijen untuk melindungi WNI. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi krusial yang tidak didapatkan dalam proses koordinasi terbuka dengan mitra kerja dan simpul masyarakat di luar negeri. Hal ini dikarenakan data dan informasi untuk menghasilkan output masih memerlukan kegiatan tertentu yg dilakukan secara tertutup. Apabila kegiatan pelindungan WNI ini tidak didukung oleh kegiatan intelijen maka kualitas output yg dihasilkan belum optimal dalam memenuhi tugas dan fungsi penanggulangan tindak pidana terorisme.

- c. Pada output “Partisipasi Aktif dalam Upaya Pelindungan Kepentingan Nasional dari Tindak Pidana Terorisme” telah **mencapai kinerja hingga 100% (dua rekomendasi kebijakan)** dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi perlindungan kepentingan nasional dari ancaman tindak pidana terorisme di luar negeri, yang menghasilkan **1 (satu) rekomendasi kebijakan**.

Pada tahun 2023, telah dilaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka upaya pelindungan kepentingan nasional dari tindak pidana terorisme **melalui Penyusunan Modul Pelatihan Bagi Instruktur Orientasi Pra-Pemberangkatan** dengan Keterlibatan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Organisasi Internasional (Kemitraan Australia Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) dan *Migrant CARE*). Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan, antara lain:

- Kegiatan Diskusi "Pembahasan Kajian terdahulu dan Rapat Tim Penyusun Modul".

- Kegiatan Diskusi "*Drafting* Bahan Bacaan dan Media Visual".
- Pembahasan Draft Modul Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Ke Terorisme untuk Instruktur Orientasi Pra-Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia.
- *Workshop/Konsinyering* lanjutan Pembahasan dan Finalisasi Draft Modul Pencegahan Ekstremisme Kekerasan untuk Orientasi Pra-Pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia.
- Uji Coba Modul yang dilaksanakan di 3 provinsi, antara lain: Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
- Finalisasi Modul Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Ke Terorisme untuk Instruktur Orientasi Pra-Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia.
- *Launching* Modul Pelatihan Bagi Instruktur Orientasi Pra-Pemberangkatan.

Selain itu, telah dilaksanakan pula kegiatan dalam rangka **Koordinasi antar Kementerian/Lembaga** terkait Pelindungan Perkeja Migran Indonesia di Luar Negeri dari Tindak Pidana Terorisme. Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan, antara lain:

- *Training on Preventing and Countering Violent Extremism for Instructors of Indonesian Migrant Workers Pre-Departure Orientation*;
- Rapat Koordinasi Pelindungan WNI yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah dari Tindak Pidana Terorisme dan *Training of Trainer* Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Kepada Terorisme di Semarang, Jawa Tengah;
- Rapat Koordinasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Provinsi Jawa Timur dari Tindak Pidana Terorisme Dan Potensi Kerjasama Antara BNPT Dengan K/L Terkait, *Training of Trainer* Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Kepada Terorisme

Kepada Instruktur Orientasi Pra-Pemberangkatan Calon Pekerja Migran di Surabaya, Jawa Timur; dan

- Diseminasi Kepada Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia (KAWAN PMI).

- 2) Penggalangan Mitra Bidang Perangkat Hukum Internasional dan Operasional Tim Penanggulangan Pendanaan Terorisme (*Counter Terrorist Financing*) untuk Memenuhi Standar Hukum Internasional.

Kegiatan ini menghasilkan **1 (satu) rekomendasi kebijakan** terkait Analisis Ancaman dan Upaya Pencegahan Kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Luar Negeri, baik Sebelum, Saat dan Paska Keberangkatan dan Kepulangan dari Tindak Pidana Terorisme. Penggalangan dilakukan kepada aset yang ada di dalam negeri seperti akademisi, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan hingga instansi yang terkait. Aset yang dimaksud memiliki tugas untuk melakukan pembekalan kepada WNI yang akan ditempatkan di luar negeri baik dengan tujuan bekerja maupun studi. Penggalangan ini bertujuan sebagai sarana bertukar informasi terhadap potensi terorisme dan diharapkan aset tersebut dapat menjadi sumber informasi intelijen sehingga ancaman dapat lebih dini ditanggulangi.

C. Kinerja Anggaran

Selama tahun 2023, realisasi anggaran pada Deputi Bidang Kerja Sama Internasional sebesar 99.91% dari pagu anggaran yang telah ditetapkan setelah mengalami realokasi dan refocusing anggaran.



Pagu anggaran Deputi Bidang Kerja Sama Internasional pada tahun 2023 setelah *automatic adjustment* sebesar Rp. 19.903.213.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar 99.91% atau sebesar Rp. 19.885.594.460,- dengan rincian per komponen seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut:

Kinerja Anggaran Tahun 2023
Deputi Bidang Kerja Sama Internasional

(dalam Rp)

No .	Keterangan	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Automatic Adjustment	Realisasi Anggaran Kumulatif	
				Realisasi	%
1.	Kerja Sama Regional dan Multilateral dalam Penanggulangan Terorisme	5.376.954.000	6.445.459.000	6.428.523.310	99.74%
2.	Kerja Sama Bilateral dalam Penanggulangan Terorisme	6.262.393.000	8.428.110.000	8.427.679.617	99.99%
3.	Partisipasi Aktif BNPT di Forum Penanggulangan Terorisme Internasional	5.221.372.000	5.029.644.000	5.029.391.533	99.99%
Total		16.860.719.000	19.903.213.000	19.885.594.460	99.91%



4

Penutup

Simpulan Umum atas capaian Deputi Bidang Kerja Sama Internasional serta Langkah yang akan dilakukan di masa depan untuk meningkatkan kinerja.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada laporan di atas, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan:

- Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Deputy Bidang Kerja Sama Internasional pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran, yang tercermin dalam:
 - Pencapaian target kinerja 100%
 - Penyerapan anggaran 99.91%
- Kendala utama dalam pelaksanaan program kegiatan Deputy Bidang Kerja Sama Internasional T.A. 2023 adalah Blokir DIPA BNPT T.A. 2023 yang mengakibatkan penyesuaian anggaran dalam mengakomodir jalannya program kegiatan. Hal ini antara lain berdampak pada pergeseran prioritas kegiatan, penundaan dan pergeseran anggaran untuk pelaksanaan kegiatan;
- Realokasi anggaran pada tahun 2023 telah diupayakan berbanding lurus dengan target capaian kinerja, yakni melalui tambahan *automatic adjustment* (buka blokir) untuk menunjang capaian kinerja.

B. Rekomendasi

Berikut merupakan rekomendasi yang dapat disampaikan guna kelancaran pencapaian kinerja pada tahun berikutnya:

- Mempersiapkan perencanaan kerja dan perencanaan anggaran terhadap kegiatan tahun 2024 untuk mengembalikan program kegiatan sebagaimana sebelum masa pandemi.
- Melakukan koordinasi, komunikasi dan negosiasi dengan K/L dan mitra sehingga sejumlah kegiatan disepakati untuk dilaksanakan secara bersama (co-hosting), ataupun kegiatan dilaksanakan dengan pembiayaan mitra;
- Tetap mendorong Kedeputian Bidang Kerja Sama Internasional untuk menjaga perbandingan yang lurus antara perevisian anggaran dan target capaian kinerja;
- Perlunya penentuan program prioritas untuk menyikapi segala keterbatasan ruang gerak

dalam situasi pemblokiran anggaran di tahun berjalan;

- Mengupayakan penggunaan inovasi teknologi melalui pertemuan virtual dalam pelaksanaan kerja sama maupun implementasi kerja sama.

Target-target dalam IKU yang ditetapkan sesuai dengan Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam Perjanjian Kinerja yakni $\geq 100\%$, dan proses *refinement* Perjanjian Kinerja yang dilakukan rutin setiap tahun menjadi bukti komitmen Deputy Bidang Kerja Sama Internasional yang akan terus memperbaiki diri dan tidak merasa cukup atas ketercapaian target.

Adapun tahun 2023 bukanlah tahun tanpa cela - sempurna, tanpa perbaikan; proses reviu atas pelaksanaan kinerja – refinement Perjanjian kinerja, penyusunan Perencanaan Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mendorong proses bisnis dan layanan Deputy Bidang Kerja Sama Internasional yang lebih baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 Deputy Bidang Kerja Sama Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini dibuat sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program kegiatan..



Lampiran

FOTO-FOTO KEGIATAN KEDEPUTIAN BIDANG KERJA SAMA INTERNASIONAL



Kegiatan Peluncuran Modul “Cegah Ekstremisme, Lindungi Pekerja Migran Indonesia”



Laporan Pelaksanaan Pertemuan *The 3rd Senior Official Counter Terrorism Policy Forum (SOCTPF)*



Laporan Pertemuan dengan UNICEF Suriah membahas Tindak Lanjut Rencana Kerja Sama Repatriasi Anak-Anak Indonesia dari Kamp di Timur Laut Suriah



Laporan Pelaksanaan the 4th STRIVE Juveline Project Coordination Meeting



Serah Terima Platform Indonesia I-Khub dari Peace Generation Indonesia kepada BNPT RI



Diseminasi RAN PE dan Penyerahan Panduan Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan RAN PE di Daerah



The 2nd Joint Working Group on Counter Terrorism Cooperation Indonesia - Belgium



Workshop on the Integration of Children Associated with Foreign Terrorist Fighters



Bilateral Meeting dan Penandatanganan MoU Kerja Sama Penanggulangan Terorisme antara Indonesia dan RRT



The 2nd Bilateral Counter Terrorism Consultation between Indonesia and Netherlands



Training of Trainer Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme kepada Instruktur Orientasi Pra-Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia



Kegiatan Direktorat Perangkat Hukum Internasional



Kegiatan Direktorat Perangkat Hukum Internasional



Kegiatan Direktorat Perangkat Hukum Internasional